

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Lumajang merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah kabupaten berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

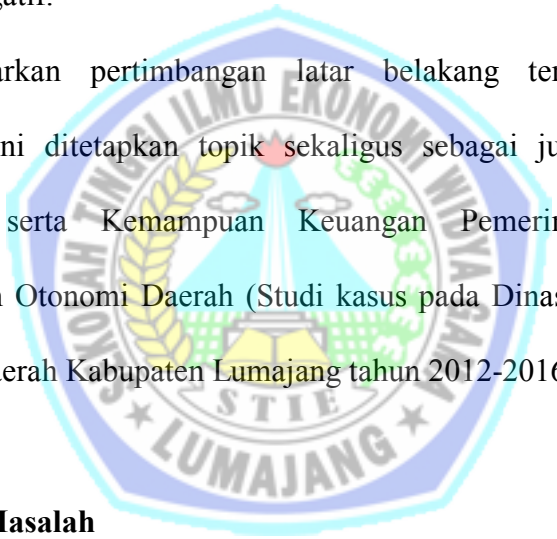
Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) tentang Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Tahun Anggaran 2007-2011) menunjukkan, bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi yang terus meningkat berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun

ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki tren negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

Machmud (2014) meneliti tentang Analisis kinerja keuangan daerah di provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012 dapat digambarkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan tren positif dan tren negatif.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ditetapkan topik sekaligus sebagai judul: “Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012-2016)”.

1.2. Batasan Masalah

Permasalahan didalam penelitian ini akan dibatasi pada pengukuran kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Lumajang dengan menggunakan indikator analisis rasio keuangan pada APBD yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Aktivitas, dan Rasio kemampuan keuangan daerah.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan otonomi daerah periode 2012-2016 ditinjau dari rasio keuangan?
2. Bagaimana kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam periode 2012-2016 ditinjau dari rasio keuangan?

2.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah periode 2012-2016 ditinjau dari rasio keuangan.
2. Menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan otonomi daerah periode 2012-2016 ditinjau dari rasio keuangan.

2.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu akuntansi pemerintahan pada khususnya.

